

BAB V

KESIMPULAN

Kurang lebih setengah abad gerakan separatis OPM mampu bertahan dari berbagai permasalahan yang ada. Kemampuan bertahan dalam tekanan demi memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat perlu diacungi jempol. Berbagai strategi hard power yang digunakan OPM dapat diminimalisir oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perubahan strategi menuju soft power yang lebih mengedepankan diplomasi saat ini mulai gencarnya disokong oleh gerakan separatis tersebut. Bentuk kegagalan di masa lalu merupakan sebuah proses OPM dalam mempertimbangkan hal-hal untuk merubah pola gaya berkonflik antara pemerintah Indonesia dan OPM. Gaya berkonflik kompetiting saat ini mulai diminimalisir gerakan OPM demi keberhasilan dalam memulai membawa masalah Papua dalam lingkup Internasional. Internasionalisasi konflik Papua memberikan perhatian khusus masyarakat Internasional terhadap status kedaulatan NKRI. Hal ini dapat memberikan pengaruh negatif pada pandangan Internasional bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan masalah separatis. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antaranya :

1. Umumnya kekerasan di Papua terkait dengan konflik antar warga dengan suku, separatisme, dan kriminalitas. Proses dan hasil pembangunan di Papua selama otonomi khusus belum dirasakan sepenuhnya oleh orang asli Papua, terutama di wilayah pedalaman. Konflik di Papua bersumber pada perbedaan kepentingan antara masyarakat papua dengan pemerintah Indonesia yang kurang memperhatikan tentang kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Pada

awalnya tujuan gerakan masyarakat Papua adalah untuk memberi perhatian khusus terhadap pemerintah pusat kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang dirasakan rakyat Papua, namun pemerintah pusat merasa bahwa setelah diberikan otonomi khusus maka kepentingan mereka telah dipenuhi.

2. Kegiatan separatis, teror dan pembunuhan yang dijalankan oleh OPM hingga saat ini terbilang tidak efektif, kegagalan dalam menggunakan hard power dirasa perlu adanya perubahan strategi. OPM saat ini memasuki babak baru yang lebih mengedepankan penggunaan soft power atau diplomasi, yaitu dengan adanya Internasionalisasi kasus Papua dimana dengan mendirikan kantor perwakilan di Oxford pada 28 April 2013 yaitu sebagai media kampanye internasional untuk menarik simpatik dari masyarakat Internasional.
3. Pada Internasionalisasi Konflik Papua dapat dipengaruhi oleh peran Negara. Negara masih merupakan kekuatan dominan dalam politik internasional dan negara merupakan salah satu aktor pendukung proses internasionalisasi konflik etnis. Keterlibatan negara sebagai pihak ketiga dalam konflik etnis di suatu negara bukanlah sebuah kenyataan baru. Sebuah negara yang terlibat dalam konflik etnis dapat berperan sebagai pihak pendamai maupun sebagai pihak yang memperkeruh konflik. Sekali pun banyak aktor-aktor non-negara memberi dukungan pada salah satu kelompok etnis yang bertikai, dukungan yang mereka berikan tidak melebihi skala dan jumlah dukungan yang diberikan oleh negara.

4. Bentuk strategi baru yang dihasilkan merupakan cerminan dari babak baru dalam perjalanan separatis Papua, yaitu mendirikan kantor perwakilan di Oxford-Inggris. Adapun penyebab babak baru separatisme di Papua dipengaruhi oleh 2 faktor :

Faktor internal, artinya bahwa OPM menyimpulkan gerakan militernya tidak efektif. Perjalanan konflik separatis di Papua telah memasuki setengah abad lamanya. Ini merupakan perjalanan panjang dalam kisah separatis di Indonesia. Penembakan dan Kekerasan yang diluncurkan bertahun-tahun ialah hal yang sia-sia. Kesalahan terbesar dalam konflik Papua itu sendiri ialah terletak pada pemahaman tentang sejarah. Sebagian besar keanggotaan OPM tidak memahami sejarah Papua. Minimnya dokumentasi tentang Papua merupakan hal mendasar dalam memahami realita tersebut. Faktor eksternal, artinya keterlibatan OPM dalam lingkup Internasional merupakan pelajaran dari gerakan separatis yang sebelumnya telah Merdeka. Aktor pendukung gerakan separatis pun sama, yaitu hasil pembentukan dari Timor-Timur yang digunakan dalam membantu perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Mengenai kampanye Internasional, komunikasi Politik yang dijalankan OPM terbilang sangat efektif dalam membentuk komitmen Internasional. Pada Internasionalisasi Konflik Papua ada 2 hal yang ingin dicapai OPM, yaitu : peninjauan kembali tentang PEPERA atau Act of Free choice pada New York Agreement dan menuntut adanya pelanggaran HAM yang dirasakan masyarakat Papua.